

LAPORAN AKHIR
KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL PADA BUMD
DI KABUPATEN BANGLI



Oleh :
Tim Penyusun

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2024

Halaman Pengesahan

Nama Paket Pengadaan Swakelola	:	Kajian Investasi Penyertaan Modal Pada BUMD Di Kabupaten Bangli
Instansi Penanggungjawab Anggaran	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli
Tahun Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan	:	2024
Sasaran/Output	:	Dokumen Kajian Investasi Penyertaan Modal Pada BUMD Di Kabupaten Bangli
Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	3 (Tiga) bulan (90 hari Kalender)
Rencana Anggaran Biaya Pelaksana Pekerjaan	:	Rp 49.805.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)
Nama Organisasi	:	Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
Badan Hukum		
Bidang Kegiatan	:	Swakelola Tipe II
Alamat Korespondensi	:	Jl. Ratna No.51, Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar

Bangli, Oktober 2024

Ketua LPPM

Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus
Sugriwa Denpasar



Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag..
NIP. 19651231 199403 1 017

KATA PENGANTAR

Atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa penyusunan Analisis Investasi dalam rangka Rencana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ke PERUMDA Air Minum Tirta Danu Artha tahun 2024 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Analisis Investasi sebagai salah satu bahan kajian investasi pemerintah daerah adalah amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang tertuang pada pasal 16. Analisis Investasi disusun oleh Tim Peneliti yang dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Penyusunan Analisis Investasi ini bertujuan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan investasi pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyertaan atau penambahan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Analisis Investasi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah layak untuk dilakukan. Secara lebih spesifik, penyusunan naskah analisis investasi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan (tambahan) penyerataan modal/investasi, dan menganalisis kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli di PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta melalui analisis portofolio dan analisis risiko. Analisis investasi ini juga dilengkapi dengan analisis terhadap penambahan modal yang dilakukan. Keempat analisis tersebut secara umum menyimpulkan bahwa penambahan penyertaan modal kepada PERUMDA Tirta Danu Arta adalah hal yang layak dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk tujuan mendukung pencapaian tujuan perusahaan maupun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan penyediaan air bersih berkualitas bagi

masyarakat.

Terkait dengan adanya asset yang dikelola PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta yang statusnya belum ditentukan, baik yang sudah dimasukkan dalam neraca (*on balance*) maupun yang tidak dimasukkan dalam neraca (*off balance*), harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan (Perda Penyertaan modal). Status asset-asset tersebut harus jelas, agar penggunaannya lebih optimal. Asset-asset yang dapat dialihkan statusnya sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta adalah asset-asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, baik menggunakan APBD maupun hibah dari Pemerintah Pusat. Asset-asset yang sudah bisa dialihkan statusnya sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta adalah asset-asset yang tercantum dalam Tabel milik Dinas PU dengan nilai perolehan sebesar Rp. 40.287.813.572,00. Nilai asset yang dijadikan penyertaan modal adalah nilai wajar pada saat asset tersebut dijadikan penyertaan modal.

Demikian laporan Analisis Investasi ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait penambahan penyertaan modal pada PERUMDA Tirta Danu Arta.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Dasar Hukum.....	11
1.3 Identifikasi Masalah	15
1.4 Tujuan.....	15
Bab II Metode Kajian	17
2.1 Studi Pustaka	17
2.1.1 Tinjauan Mengenai Teori Investasi.....	17
2.1.2 Teori Investasi Keynes	21
2.1.3 Teori Alokasi Investasi.....	21
2.2 Metode Kajian	23
2.2.1 Lokasi Kajian	23
2.2.2 Jenis Dan Sumber Data	23
2.2.3 Instrumen Kajian	23
2.3 Teknik Pengumpulan Data	24
2.3.1 Observasi.....	24
2.3.2 Wawancara	24
2.3.3 Dokumentasi.....	24
2.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	25
Bab III Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Dan Analisis Investasi Penyediaan Air Bersih	28
Di Kabupaten Bangli	28
3.1 Badan Usaha Milik Daerah.....	28
3.2 Kebutuhan Air Kabupaten Bangli.....	29
Bab IV Analisis Investasi Pada Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten	

Bangli	35
4.1 Kondisi Keuangan Dan Operasional Pdam Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.....	35
4.2 Analisis Penambahan Investasi	42
4.3 Analisis Penyelesaian Asset Yang Belum Ditetapkan Statusnya	44
Bab V Penutup.....	47
Saran-Saran	48
Daftar Pustaka.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD disebutkan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD menurut UU Pemerintahan Daerah berupa Perusahaan Umum Daerah (seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah) dan Perusahaan Perseroan Daerah (berbentuk PT dengan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah). Upaya menghasilkan dana untuk investasi menuntut kreativitas Pemerintah Daerah untuk mencari, menggali, dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan mengefisienkan belanja daerah. Khusus untuk upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyertaan modal daerah pada usaha yang menghasilkan return yang cukup tinggi adalah salah satu alternatif karena upaya penggalan potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah secara sembarangan justru dapat mengganggu perekonomian daerah. Selain itu, penyediaan investasi daerah juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan air bersih.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Bangli berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan air minum dan air bersih berkualitas pada masyarakat Kabupaten Bangli. Ketersediaan air bersih berkualitas merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia bagi masyarakat pada kualitas dan harga yang bersaing. Penyediaan air minum di Kabupaten Bangli selama ini dikelola oleh PDAM Tirta Danu Arta, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli yang

didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 5 tahun 1986 dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli Nomor 09 Tahun 1987 seri C nomor 1. Peraturan Daerah tersebut telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 tahun 1991 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21 tahun 2001.

Sebagai sebuah entitas bisnis, PDAM Tirta Danu Arta mempunyai rencana program pengembangan dan program optimalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Peningkatan cakupan layanan dan 3K (kontinuitas, kualitas, dan kuantitas) harus menjadi perhatian utama perusahaan. Kedua hal ini menjadi *concern* karena kondisi aktual menunjukkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan menurut Kementerian PUPR Tahun 2023, Nilai Kinerja 72,38 (Baik). Perhitungan dan Penilaian Indikator Kinerja Menurut Kemendagri Nomor 47 Tahun 1999 Tahun buku 2023 nilai kinerja aspek keuangan 39,00 sedangkan nilai kinerja aspek oprasional 22,13. Selanjutnya dari nilai kinerja aspek adminsitasi sebesar 11, 25. Dalam penilaian kinerja aspek administrasi ini terlihat beberapa indikator yang belum memenuhi standar atau SOP seperti indikator Pedoman Penilaian Kinerja karyawan belum dimiliki oleh PDAM Tirta Danu Arta dengan nilai D, dan untuk indikator lain yang memilik nilai rendah adalah tindak lanjut hasil pemriksaan tahun terkahir dengan nilai C. Jumlah pelanggan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 2, 95%. Dalam peningkatan kuantitas sudah memenuhi, namun dalam kepastian kualitas belum sepenuhnya dapat memenuhi kualitas. Kualitas air belum memenuhi persyaratan Permenkes Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang persyaratan Kualitas Air Minum.

Di bawah ini adalah aspek distribusi pendapatan Kabupaten Bangli dari tahun 2019-2023:



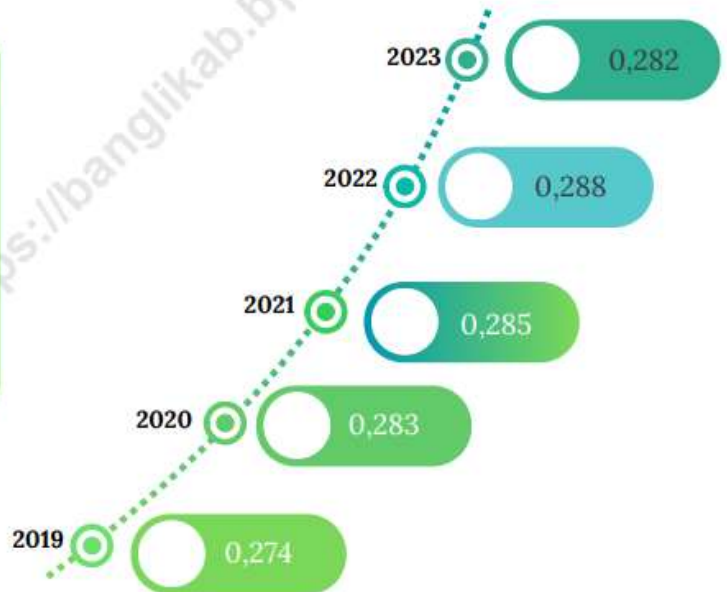
DISTRIBUSI PENDAPATAN

Rasio Gini Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023



Koefisien Gini menunjukkan ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat.

Pada tahun 2023, ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami **penurunan** dibanding tahun 2022.



Sumber : BPS 2024

Pada aspek lain, distribusi pendapatan Kabupaten Bangli dapat dilihat pada tahun 2023, dimana ketimpangan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari Kurva diatas. Badan Pusat Statistik, secara umum perekonomian Ekonomi Bali selama periode triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 3,60 persen jika dibandingkan dengan capaian triwulan III-2023 (q-to-q). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada periode triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,86%. Jika diakumulasikan dari triwulan I-2023 sampai dengan triwulan IV-2023, maka ekonomi Bali pada tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,71% (c-to-c). Secara umum untuk Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Bangli pada khususnya dapat dinyatakan bahwa kondisi perekonomian yang cukup menggembirakan ini mengindikasikan bahwa perputaran uang dan daya beli masyarakat yang sudah relatif lebih baik.

PDRB Menurut Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾	2021 ¹⁾	2022 ²⁾	2023 ³⁾
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 276 607,27	4 616 013,79	5 032 804,79	2 805 886,50	2 885 378,46	3 031 239,67
Pengeluaran Konsumsi LNPR	119 181,97	138 428,22	162 430,43	76 595,85	84 644,60	95 883,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 286 158,78	1 320 141,50	1 337 175,52	793 123,95	794 215,37	777 847,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 580 037,26	2 735 260,18	2 866 083,05	1 677 466,54	1 693 521,19	1 724 535,31
Perubahan Inventori	19 823,78	21 386,54	8 524,17	10 818,73	11 296,67	4 412,49
Net Ekspor	-1 456 250,68	-1 493 239,91	-1 498 708,45	-979 165,98	-961 675,46	-968 817,89
PDRB	6 825 558,37	7 337 990,33	7 908 309,50	4 384 725,60	4 507 380,84	4 665 100,46
Sumber : BPS Kabupaten Bangli						
Keterangan: 2022 adalah angka sementara 2023 adalah angka sangat sementara						

Berdasarkan data BPS di atas, dapat dilihat PDRB Kabupaten Bangli untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Idealnya, kondisi perekonomian yang sudah relatif bagus ini sejalan dengan upaya optimalisasi dan rencana pengembangan yang akan dilakukan PDAM Tirta Danu Arta, karena termasuk konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan pelanggan PDAM Tirta Danu Arta yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir karena pesatnya perkembangan perumahan dan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bangli agar memenuhi keperluan pelanggan. Apalagi Kabupaten Bangli sedang giatnya untuk menata dan mengembangkan daerah tujuan wisata. Tentunya hal ini menjadi sinyal kepada perusahaan agar mampu menangkap peluang dalam upaya pengembangan dan optimalisasi perusahaan, terutama berkaitan dengan cakupan pelayanan yang masih jauh dari ideal. Kondisi pada PDAM Tirta Danu Arta yang menunjukkan cakupan layanan yang masih belum optimal harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bangli dalam upaya menjadikan BUMD sebagai salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks perusahaan Perumda Air Minum Kabupaten Bangli, sebagaimana juga lazim pada PDAM di daerah lain, kewajiban untuk menyetorkan sebagian laba perusahaan ke kas daerah baru akan terjadi jika cakupan layanan telah melebihi 80% (Pasal 20 ayat 5 Perda No. 4 tahun 2015). Hal ini dimaksudkan untuk penguatan permodalan perusahaan

secara internal dari reinvestasi laba ditahan. Perusahaan telah mengajukan permohonan pengesahaan Rencana Binis Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.

Besaran dana investasi yang diberikan kepada Perumda Tirta Danu Arta, belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan kondisi keuangan perusahaan, manajemen PDAM Tirta Danu Arta menilai masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan program pengembangan secara masif berupa pembukaan layanan baru sehingga manajemen berfokus kepada upaya optimalisasi.

Sebagai pemilik BUMD, Pemerintah Kabupaten Bangli, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dapat saja menganggarkan pembiayaan berupa penyertaan modal pada PDAM pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, sesuai dengan amanat PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, terhadap rencana penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada BUMD perlu disusun analisis investasi. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasipemerintah sebelum melakukan investasi. Ayat (2) kemudian mengatur bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. Pengelola investasi yang dimaksud adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat tersebut diminta untuk menyusun analisis investasi sebelum suatu investasi diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penyusunan analisis investasi daerah adalah sebuah amanat yang harus dipenuhi sebelum penyertaan modal dilakukan.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Kajian Investasi Pernyataan Modal pada BUMD dikabupaten Bangli, mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah
- b. Bahwa penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa penyertaan modal ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 Ayat (5);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tentang Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan";
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan daerah tingkat II di Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Khususnya daerah Tingkat II di Daerah tingkat I Bali, termasuk Daerah Tingkat II Bangli;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang upaya untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia, melalui : (1) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) peningkatan ekosistem investasi, (3) kemudahan berusaha, (4) ketenagakerjaan, (5) dukungan riset dan inovasi, (6) kawasan ekonomi, dan lain-lain;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan : perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 mengatur tentang Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten (termasuk Kabupaten Bangli) dan 1satu kota. Dalam wilayah Provinsi Bali, selain terdapat delapan kabupaten dan satu kota, terdapat terdapat wilayah desa adat

dan subak, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali. Desa Adat diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan Subak masih menggunakan peraturan lama yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah, meliputi : (1) Perusahaan Daerah yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dapat diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah, dan (2) Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat. Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah dapat berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8). PERDA Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang (1) pengelolaan keuangan Kabupaten Bangli, (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, (3) proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (4) penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (5) laporan evaluasi realisasi semesetr I APBD dan perubahan APBD, (6) akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, (7) penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, (8) kekayaan dan utang daerah, (9) Badan Layanan Umum Daerah, (10) penyelesaian kerugian keuangan daerah, (11) informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan;

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk mengambil keputusan berinvestasi, diperlukan kajian investasi (studi kelayakan proyek/usaha). Kajian investasi (studi kelayakan proyek/usaha) meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajerial, dan aspek keuangan. Aspek pasar meliputi analisis pertumbuhan pasar pada masa yang akan datang, sehingga diketahui pertumbuhan pasar pada tahun-tahun berikutnya dan kebutuhan investasi untuk melakukan perluasan (ekspansi) usaha. Aspek teknis meliputi analisis kebutuhan mesin/instrumen dan kebutuhan mesin dan instrumen pendukung, yang sesuai dengan kondisi lokasi usaha yang berbukit-bukit di Kabupaten Bangli. Aspek manajerial meliputi kebutuhan sumber daya manusia, sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dipersyaratkan untuk masing-masing bidang pekerjaan. Aspek keuangan meliputi analisis variabel keuangan, di antaranya sumber dana (pembiayaan), analisis laba/(rugi), Cash Flow, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), analisis Break Event Point (BEP), BEP Period, dan metode amortisasi (penyusutan) aset sesuai dengan ketentuan yang ada. Analisis aspek keuangan tersebut diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi, tidak saja investasi yang akan dilakukan akan tetapi pada investasi yang sudah dilakukan namun belum dicatat sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah karena masih menunggu Peraturan Daerah Penyertaan Modal.

1.4 Tujuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah mengamatkan bahwa sebelum dilakukan penyertaan modal oleh pemerintah daerah, harus terlebih dahulu dilakukan analisis investasi. Analisis Investasi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah layak untuk dilakukan. Secara lebih spesifik,

penyusunan naskah analisis investasi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam empat tahun terakhir (2019-2022) untuk menilai kemampuan keuangan daerah dalam melakukan (tambahan) penyertaan modal/ investasi, dan
2. Menganalisis kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli di PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta melalui analisis portofolio dan analisis risiko.

Berdasarkan hasil analisis ini, diharapkan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Pemda dan DPRD) dapat memutuskan secara lebih bijaksana rencana investasinya untuk tahun 2024 ini atau untuk beberapa tahun ke mendatang. Selain itu, dari sisi PDAM Tirta Danu Arta, diharapkan dengan adanya tambahan investasi ini (jika dinilai layak) akan meningkatkan kinerja PDAM yang dinilai dengan berbagai indikator, seperti indikator kesehatan dari BPPSPAM (Kementerian PU-PR) dan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 47 tahun 1999.

Pendekatan dalam Penyusunan Analisis Investasi

Analisis investasi ini dilakukan dengan pendekatan studi arsip (*archival study*) dan studi lapangan. Data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder antara lain meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan BUMD (dalam hal ini PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta), Rencana Bisnis dan RKAP BUMD, dan Data Statistik Daerah. Sedangkan data primer berupa data yang diperoleh melalui diskusi grup terpimpin (*FocusGroup Discussion*, FGD) dan Wawancara. Analisis utama pada Analisis Investasi ini meliputi analisis terhadap analisis risiko dan analisis strategis. Analisis risiko memuat kajian terhadap dua jenis risiko utama bisnis, yakni risiko operasional dan risiko strategis. Melengkapi analisis risiko, dilakukan analisis penambahan penyertaan modal daerah. Selain itu, memberikan penilaian terhadap kelayakan melalui kedua analisis tersebut.

BAB II

METODE KAJIAN

2.1 Studi Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Teori Investasi

Setiap pengeluaran atau pembiayaan pemerintah harus dapat dianggap sebagai suatu investasi. Oleh sebab itu pendekatan pembangunan dapat menggunakan model produksi. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan oleh pendapatan masyarakat baik secara kolektif maupun individu. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah melalui peningkatan produksi melalui pada wilayah tersebut. Sedangkan peningkatan produksi sendiri ditentukan oleh modal fisik dan modal manusia. Penjelasan ini dapat digambarkan dalam model berikut :

$$Y = F(A, K, L)$$

Dimana Y adalah output, A adalah teknologi, K adalah (kapital stock) dan L adalah tenaga kerja (modal manusia). Persamaan ii disebut *supply-oriented*. Untuk menyeimbangkan digunakan model pertumbuhan Keynesian yang merupakan fungsi konsumsi dari perekonomian yaitu :

$$Y = C + I + G$$

Dimana pendapatan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh konsumsi (C), investasi(I) dan pengeluaran pemerintah (G). Sedangkan investasi sendiri diperoleh dari persamaan :

$$I = F(YL, PCY)$$

Dimana YL , adalah Produk Domestik Bruto (PDB) pekerja dan PCY adalah pendapatan per kapita.

Sementara pada kondisi *steady state* Solow menggambarkan model pertumbuhan sebagai berikut:

$$Y/L = A(s/(x+\delta+n))^{\omega/(1-\alpha)}$$

Dimana Y/L adalah output per individu, A adalah level produktivitas tenaga kerja, s adalah rasio investasi terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB), x adalah tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, δ adalah depresiasi, n adalah jumlah penduduk, α adalah proporsi pendapatan kapital terhadap PDB.

Dimana Y/L adalah output per individu, A adalah level produktivitas tenaga kerja, s adalah rasio investasi terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB), x , tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, δ adalah depresiasi, n adalah jumlah penduduk, α adalah proporsi pendapatan kapital terhadap PDB.

Model diatas memberikan gambaran pentingnya investasi dalam peningkatan pendapatan nasional. Sebagian besar ahli ekonomi Klasik, Keynesian maupun Neo klasik, memperlihatkan bagaimana pentingnya modal manusia dan modal fisik dalam peningkatan pertumbuhan yang merupakan gambaran peningkatan pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Dengan semakin tingginya produktivitas tenaga kerja yang diiringi dengan tingginya investasi, dan semakin kecilnya jumlah penduduk dan depresiasi maka pendapatan perkapita akan semakin tinggi. Model ini menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Di samping itu, model tersebut juga menggambarkan bahwa investasi sendiri ditentukan oleh pendapatan pekerja. Dengan semakin tinggi pendapatan pekerja,

maka proporsi konsumsi pekerja akan berkurang dan masyarakat akan cenderung untuk melakukan atau meningkatkan tabunganya. Pada kondisi kesimbangan maka tabungan akan sama dengan investasi, yang berarti setiap tabungan yang akan digunakan sebagai investasi oleh masyarakat melalui mekanisme perbankan dalam bentuk kredit. Namun demikian, sumber investasi tidak hanya berbentuk kredit atau pinjaman dari bank. Seorang pekerja mungkin akan menanamkan modalnya dengan membeli saham. Oleh sebab itu lembaga keuangan sangat berperanan penting dalam penciptaan modal investasi.

Penelitian Barro terhadap 100 negara dari tahun 1960-1995 dengan menggunakan estimasi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan dan investasi dipengaruhi secara positif oleh pendapatan perkapita, rule of law, indeks demokrasi, dan pertumbuhan perdagangan internasional. Akan tetapi juga dipengaruhi secara negatif oleh konsumsi pemerintah, indeks, laju inflasi, lamanya waktu untuk menempuh pendidikan dan tingkat fertilitas.

Digambarkan pula bahwa untuk kasus Indonesia, pertumbuhan ekonominya dari tahun 1960 sampai tahun 1995 tingkat pertumbuhannya mencapai 4,1 persen dengan prediksi pertumbuhan tahun 1996 sampai tahun 2006 sebesar 2,7 persen. Selain itu PDB, konsumsi pemerintah dan tingkat kelahiran memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan sedangkan lamanya waktu untuk menempuh pendidikan dan rule of law memberikan kontribusi yang negatif.

Penelitian ini menunjukkan pentingnya lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan investasi. Lingkungan yang dimaksud di sini bukan hanya situasi ekonomi makro tetapi juga iklim politik, demokratisasi, kepastian hukum serta kesiapan sumber daya manusia yang berpendidikan (memiliki kompetensi dan skill sesuai dengan kebutuhan). Secara teoritis misalnya semakin banyak waktu yang digunakan oleh individu maka kemampuan *skill*nya semakin tinggi dalam bekerja sehingga akan meningkatkan produktifitas. Tetapi hal ini sering tidak terjadi karena ketidak sesuaian antara kebutuhan dunia usaha dan lulusan dari lembaga pendidikan. Selain itu jumlah penduduk yang

besar mengakibatkan tingginya tingkat kelahiran ternyata tidak memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan, bahwa pengaruhnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk adalah beban yang harus ditanggung oleh suatu negara .

Menurut Martines-Vasquez dan McNab, terdapat dampak tidak langsung dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui adanya efisiensi konsumsi, efisiensi produksi, distribusi sumberdaya geografis, stabilitas ekonomi makro, berkurang korupsi dan kejahatan oleh para elit penguasa. Desentralisasi diharapkan akan dapat memacu efisiensi karena biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mengatui daerah didistribusi ke daerah . Selain itu masyarakat di daerah lebih mudah untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan perijinan. Selain itu perencanaan kegiatan pembangunan maupun anggaran akan lebih leluasan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun demikian tidak semua daerah kegiatan desentralisasi dapat menjamin pertumbuhan melalui variabel-variabel penentu diatas, karena dalam prakteknya malah terjadi sebaliknya.

Sedangkan Hsu dalam studinya di Taiwan memberikan indikasi bahwa pemerintah tidak harus melakukan intervensi langsung pada produksi dan investasi, tetapi pemerintah seharusnya membuka kesempatan kepada kegiatan investasi oleh perusahaan swasta dan investor asing untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta dan transfer teknologi. Hasil penelitian ini memberikan suatu usulan bagi negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan untuk mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur untuk merangsang investor domestik dan asing menanamkan modal di negara itu. Investasi yang dilakukan pemerintah seringkali tidak efisien karena cara kerja dan lingkungan kerja yang birokratis. Dengan mengalihkan semua investasi kepada swasta maka pemerintah akan lebih banyak berkonsentrasi pada pelayanan publik yang secara tidak langsung mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya mengenai teori - teori investasi dapat diuraikan sebagai berikut

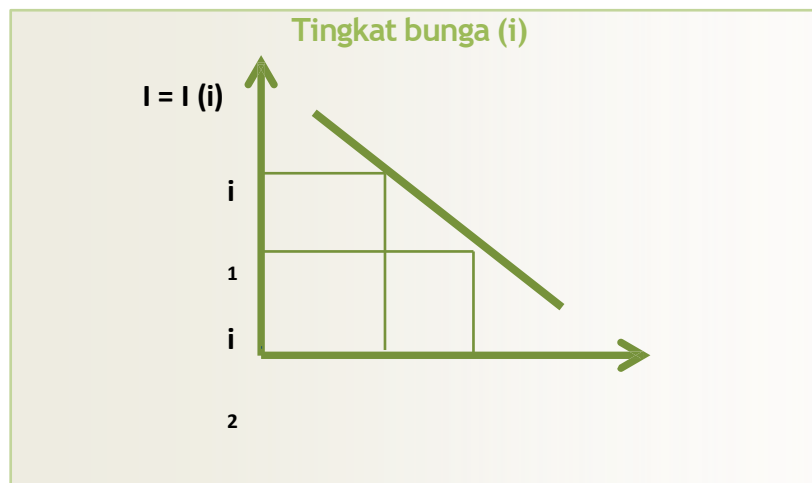
2.1.2 Teori Investasi Keynes

Keynes mendasarkan teori investasi atas dasar konsep efisiensi marginal modal (*Marginal Efficiency of Capital* atau *MEC*). MEC didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran setiap tambahan modal. MEC lebih tepat dinyatakan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan di masa yang akan datang dengan biaya sekarang dari tambahan modal (Nanga, 2001:124).

Hubungan antara permintaan investasi, tingkat bunga (i) dengan MEC diformulasikan oleh Keynes sebagai berikut:

$$I = f(i) \text{ (given MEC)}$$

Secara grafis hubungan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kurva Permintaan Investasi

Apabila tingkat bunga turun dari i_1 ke i_2 maka permintaan investasi menjadi meningkat dari I_1 ke I_2 , dan terjadi sebaliknya jika suku bunga meningkat.

2.1.3 Teori Alokasi Investasi

Teori Rahman (1964:654) merupakan model perekonomian tertutup, dimana perekonomian dianggap terdiri dari dua *region* dan masing-masing

memproduksi barang yang sama. *Output* masing- masing *region* merupakan proporsi dari investasi yang ditanamkan (*the regional capital stock*). Rasio tabungan bervariasi antar *region*. Total tabungan dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk selanjutnya didistribusikan kembali ke *region*. Tujuan utama pemerintah adalah menciptakan kesinambungan alokasi regional dana investasi yang mampu menghasilkan tingkat *output* nasional yang maksimal.

Berdasarkan kondisi di atas maka formulasi asumsi-asumsi model Rahman adalah: (1) perekonomian terdiri dari dua sektor; (2) masing-masing *region* memproduksi barang yang sama melalui fungsi produksi linier $Y_i = b_i K_i$, dimana memiliki *output capital ratio* yang tetap dan tidak ada depresiasi *capital*; (3) total investasi dana berasal dari total tabungan masing-masing *region*; (4) *The propensity to save* (s) dan *output capital ratio* (b) konstan sepanjang waktu; (5) total investasi dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan dialokasikan kembali ke *region* masing- masing (Bayu, 2001: 4).

Masalah yang akan dipecahkan disini adalah berkaitan dengan cara mengalokasikan dana investasi pada masing-masing *region* untuk memaksimalkan total produksi (pendapatan/ekonomi) pada masa mendatang. Sehingga pertumbuhan ekonomi regional dikontrol melalui investasi antar *region*, modelnya sebagai berikut:

Objektive : $\text{Max. } Y_i(t) = b_1 K_1 + b_2 K_2(t)$

subject to : $K_i(t) = B(t) (a_1 K_1(t) + a_2 K_2(t))$

Dimana :

$Y_1(t)$ = Pendapatan *region* i pada waktu t

$K_i(t)$ = *Capital* / investasi pada *region* i pada waktu t
 = *Output capital ratio* di *region* i

B = Proporsi total investasi di *region* i

Dan $a_i = b_i s_i$ adalah tingkat pertumbuhan *autonomous* di *region* i dan dari asumsi (3) di atas kita dapatkan $K_1 + K_2 = s_1 Y_1(t) + s_2 Y_2(t)$, dimana s adalah rasio tabungan.

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa kebijakan alokasi investasi yang

optimal tergantung pada nilai relatif tingkat tabungan dan *output-capital ratio*. Ada dua kasus yang berbeda, yaitu : *Pertama*, pada kasus umum yaitu apabila tidak ada perbedaan tingkat tabungan antar region, maka konsentrasi alokasi pada *region* yang paling produktif. *Kedua*, pada kasus yang dimana tingkat tabungan di daerah yang kurang produktif, lebih besar dari pada di daerah yang produktif maka alokasi investasi diprioritaskan di daerah pertama (Rahman, 1964:665).

Menurut Fujita (dalam Bayu, 2001:5) apabila investasi (I) dapat bergerak tanpa *input* transpor diantara dua *region*, maka setiap satu unit barang yang diinvestasikan akan menjadi *immobil capital* di daerah yang bersangkutan. Fujita berpendapat bahwa alokasi investasi regional tidak dipengaruhi oleh seberapa kecil perbedaan harga capital masing-masing region. Alokasi investasi regional dipengaruhi oleh harga tertinggi masing-masing periode. Investasi akan dialokasikan sama besar di kedua region ketika harga modal memiliki nilai yang sama di kedua region

2.2 Metode Kajian

2.2.1 Lokasi Kajian

Lokasi Kajian Investasi Penyertaan Modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta dilakukan dengan mencari data faktual di wilayah kabupaten Bangli.

2.2.2 Jenis dan Sumber data

Data primer akan diperoleh langsung dari tangan pertama di lokasi kajian, baik melalui wawancara dengan narasumber dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder akan diperoleh secara tidak langsung dan dikumpulkan dari berbagai arsip, dokumen, literatur, data statistik, maupun catatan-catatan lainnya yang relevan dengan kajian yang baik di instansi pemerintah maupun swasta.

2.2.3 Instrumen Kajian

Kajian Investasi Penyertaan Modal Pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta ini akan menggunakan pedoman wawancara untuk mewawancarai para informan terpilih dan juga menggunakan pedoman *Focus Group Discussion (FGD)* untuk mendapatkan data dari *stakeholders*. Semua jawaban/informasi akan direkam

dengan sebaik-baiknya dengan *tape recorder*, kamera, catatan sistematis.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam kajian ini, yaitu:

2.3.1 Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Menurut Bungin (2007) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah topografi, jumlah dan durasi, intensitas atau kekuatan respon, stimulus kontrol (kondisi dimana perilaku muncul), dan kualitas perilaku.

2.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara semi terstruktur (Sugiyono, 2013) adalah wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan.

2.3.3 Dokumentasi

Sugiyono (2018) menjelaskan dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau

mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di *website*, dan lain-lain.

2.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Tahap-tahap dalam melakukan kajian investasi penyertaan modal yang umum dilakukan sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dan informasi;
2. Melakukan pengolahan data;
3. Analisis data;
4. Mengambil keputusan; dan
5. Memberikan rekomendasi.

Empat aspek pokok yang menjadi perhatian dalam kajian investasi penyertaan modal antara lain:

1. Aspek Pasar dan Pemasaran

Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada potensi pasar akan selalu diikuti oleh kegiatan pemasaran dan setiap kegiatan pemasaran adalah bertujuan untuk mencari atau menciptakan pasar dan hal ini juga memberikan manfaat untuk memudahkan dalam transaksi. Aspek pasar meliputi upaya melakukan analisis produk, perkembangan harga, proyeksi permintaan, dan proyeksi produksi. Melalui analisis pasar dan pemasaran, potensi bisnis dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Melalui aspek pasar dan pemasaran, akan diketahui besar pertumbuhan pasar/permintaan dan strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar tersebut, seperti jenis produk dan spesifikasinya.

2. Aspek Teknis

Aspek teknis dilakukan dengan menganalisis kebutuhan secara teknis dan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Aspek teknis menganalisis kebutuhan tempat usaha (kantor, gudang, dan/atau pabrik), saluran distribusi, serta kebutuhan *equipment*. Analisis aspek teknis menjadi sebuah keharusan untuk menghindari adanya kegagalan bisnis pada masa yang akan datang, sebagai akibat karena adanya masalah teknis. Aspek teknis meliputi analisis berkaitan dengan analisis lokasi proyek/usaha (seperti ketersediaan sumber air, lokasi konsumen yang dituju, sumber daya energi yang tersedia), analisis produksi (volume air, kebutuhan konsumen (m³)), kondisi geografis pendistribusian (berbukit-bukit, di mana sumber air berlokasi di bawah sementara tujuan distribusi ada di atas), dan pemilihan jenis teknologi yang digunakan.

3. Aspek Manajerial

Aspek manajerial menganalisis kebutuhan sumber daya, baik sumber daya manusia/tenaga kerja, meliputi tenaga kerja kasar dan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis maupun sumber daya modal (uang, barang, dan jasa). Aspek manajerial meliputi manajemen pembangunan proyek dan manajemen dalam operasional.

4. Aspek Ekonomi dan Keuangan

Aspek keuangan menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, dianalisis juga perihal dari mana saja sumber investasi dan pembiayaan bisnis tersebut. Analisis aspek keuangan dihitung dengan rumusan penilaian investasi seperti Analisis *Cash Flow*, Analisis Laba/Rugi, *Payback Period*, *Net Present Value*, *Internal Rate Of Return*, *Benefit Cost Ratio*, dan *Break Event Point*. Dengan penilaian tersebut, dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap besaran biaya dan investasi dengan harapan pedoman penilaian tersebut dapat memberikan rekomendasi yang menguntungkan.

Berbeda dengan analisis aspek keuangan yang hanya membatasi manfaat

dan pengorbanan dari perusahaan saja, analisis aspek ekonomi dapat memberikan mafaat yang lebih luas. Tidak saja manfaat kepada perusahaan, akan tetapi juga kepada dunia usaha dan masyarakat luas. Seperti munculnya peluang usaha lain, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan pemerintah, dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANU ARTA SEBAGAI BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN ANALISIS INVESTASI PENYEDIAAN AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANGLI

3.1 Badan Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan pendirian BUMD untuk adalah pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sebelum diterbitkannya PP 54 Tahun 2017 ini, dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik-beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BUMD untuk mengembangkan usahanya, khususnya melalui Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

BUMD dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat pada lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perusahaan daerah merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang perlu dikelola secara profesional. Selanjutnya, perusahaan daerah juga harus dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan salah satu tugas penting yaitu sebagai sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan daerah diharapkan mampu untuk memberikan kontribusinya dalam penyerapan laba perusahaan yang digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan digunakan sebagai indikator motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keuangan daerah. Dengan kemampuan keuangan yang baik, BUMD akan berkontribusi

secara optimal terjadap keuangan daerah, memberikan layanan melalui penyediaan produk-produk, baik berupa barang maupun jasa secara langsung kepada masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyiratkan bahwa investasi yang akan direncanakan oleh suatu pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tersebut. Karena itu, jika suatu daerah berencana akan melakukan investasi (penyertaan modal daerah), baik investasi awal maupun penambahan investasi daerah pada BUMD, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut. Jika kemampuan daerahnya tergolong sedang atau tinggi, maka daerah tersebut dapat leluasa berinovasi melalui berbagai program pembangunan, termasuk melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Tetapi sebaliknya apabila kemampuan keuangan daerahnya tergolong rendah, agak sulit untuk memenuhi seluruh belanja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

3.2 Kebutuhan Air Kabupaten Bangli

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum TIRTA DANU ARTA adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Bangli. PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta diberikan tugas menyediakan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bangli. Sehingga bidang usaha PERUMDA Air Minum TIRTA DANU ARTA adalah mengelola sumber air bersih dan mendistribusikan air bersih kepada masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, rumah tangga, industri maupun perkantoran. Dengan demikian, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta merupakan BUMD penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.

Penyediaan air minum adalah suatu usaha dalam menyediakan air bersih yang layak pakai untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap harinya agar tercapai kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan sebuah sarana dan prasarana untuk

menyediakan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Pelanggan pengguna air bersih di Kabupaten Bangli, diklasifikasikan menjadi empat golongan, sebagai berikut :

1. Golongan non niaga, seperti pelanggan rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga per sambungan sebanyak enam orang.
2. Golongan niaga, meliputi instansi pemerintah, hotel, restoran, bengkel, tempat hiburan, pasar swalayan, rumah sakit swasta tipe A/B, pompa bensin, toko, mini market, klinik swasta, kantor perusahaan swasta, dan warung.
3. Golongan sosial umum, pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti kamar mandi umum, kran umum, dan terminal air.
4. Golongan sosial khusus, pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum, seperti pesantren, yayasan sosial, tempat pertemuan (balai banjar, balai subak), dan tempat ibadah.

Sementara itu, Direktorat Jendral Cipta Karya (1998) membagi kebutuhan standar kebutuhan air bersih berdasarkan lokasi wilayah, yaitu :

1. Daerah pedesaan, sebesar 60 liter/orang/hari
2. Daerah kota-kota kecil, sebesar 90 liter/orang/hari
3. Daerah kota-kota sedang, sebesar 130 liter/orang/hari
4. Daerah kota-kota besar, sebesar 150 liter/orang/hari
5. Daerah kota-kota metropolitan, sebesar 160 liter/orang/hari.

Menurut data statistik tahun 2022, penggunaan air bersih (dalam 000 m³) di Kabupaten Bangli, yaitu : sosial/umum (4), rumah tangga (3,514), pemerintah (2), niaga (328), industri (22), dan lainnya (5.678). Berdasarkan data tersebut, pengguna air bersih tertinggi adalah rumah tangga, yang tergolong non niaga (bersubsidi).

Sebagai perusahaan penyedia air bersih untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat Kabupaten Bangli, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta ditargetkan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diharapkan mampu *survive* dan berkelanjutan dengan menargetkan kinerja keuangan yang baik. Sebagaimana diketahui Kabupaten Bangli dengan lokasi yang berbukit-bukit. Lokasi pemukiman masyarakat sebagai konsumen air bersih di pegunungan, sementara sumber air berada di bawah, yang memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan distribusi air bersih ke tempat yang lebih tinggi. Biaya yang diperlukan adalah untuk membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terdiri dari penampungan sumber air, pemompaan air ke tempat yang lebih tinggi, dan penyaluran (pemipaan). Oleh karena itu, diperlukan dukungan (investasi) dari Pemerintah Kabupaten Bangli untuk melanjutkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Selain itu, biaya operasional yang dibutuhkan juga tinggi, menggunakan energi listrik untuk pemompaan, dengan tarif niaga (non subsidi).

Aspek Pasar

Aspek pasar merupakan aspek utama dalam melakukan kajian investasi penyertaan modal. Dengan mengetahui pertumbuhan pasar (konsumen), dapat diputuskan kebijakan untuk melakukan ekspansi (perluasan) usaha yang memerlukan penambahan/penyertaan modal dalam kebutuhan investasi baru.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bangli, baik rumah tangga, pemerintah, niaga, industri, dan umum. Berdasarkan laporan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli Tahun Buku 2023, cakupan pelayanan mencapai 30,82% dari masyarakat yang semestinya memperoleh layanan air bersih. Itu berarti masih ada 69, 18% masyarakat Bangli yang belum terlayani air bersih oleh PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta (sebagian terlayani hibah langsung melalui pprogram PAMDES).

Jumlah pelanggan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli sebesar 23.173 merupakan 30,82% masyarakat Bangli yang sudah terlayani air

bersih. Sisanya sebanyak 69,18% (75.189) calon pelanggan yang belum terlayani air bersih oleh PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta.

Aspek Teknis

Setelah mengetahui aspek pasar (perkembangan pasar/pelanggan) dari PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis dari aspek teknis. Aspek teknis yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketersediaan sumber air, teknis pengolahannya, pendistribusian air bersih, teknologi yang digunakan dalam pengolahan dan distribusi air bersih, dan peralatan dan teknologi pendukung yang diperlukan.

Berdasarkan hasil diskusi/wawancara dengan Tim PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Bangli pada tanggal 28 Juni 2024, sumber air yang masih bisa digunakan sebagai sumber air bersih di Kabupaten Bangli adalah air Danau Batur. Sebab beberapa sumber air baku yang berasal dari air tanah (pancoran), sudah tidak layak. Karena debit airnya kecil-kecil dan lokasinya jauh dari lokasi calon pelanggan (masyarakat sebagai konsumen), membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengolahan dan distribusi sampai kepada pelanggan. Sehingga, tarif yang dibayar oleh pelanggan sangat mahal. Namun, mengangkat air Danau Batur sebagai sumber bahan baku air minum, membutuhkan investasi yang besar dan teknologi yang canggih. Untuk mengetahui besaran investasi dan jenis teknologi yang dapat digunakan, perlu dilakukan kajian mendalam. Sebab dari teknis operasional yang sudah berjalan, terdapat kebocoran air yang cukup besar (34,72%). Keadaan ini tentu menyebabkan operasional perusahaan menjadi tidak efisien antara besaran biaya investasi dan target output menjadi tidak tercapai. Hal ini dapat dipahami karena medan sumber air baku dan tujuan distribusi yang berat. Selain itu juga disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak sesuai, antara spesifikasi yang diperlukan dan mutu peralatan yang digunakan.

Aspek Manajemen

Aspek manajemen berkaitan dengan manajemen pembangunan pengolahan dan distribusi air bersih dan manajemen operasi perusahaan. Sesuai dengan

Laporan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli Tahun Buku 2023, aspek manajemen dalam operasi sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator predikat kinerja yang baik dan indikator kesehatan perusahaan (PDAM) yang sehat. Indikator tersebut dapat dicapai, dengan dukungan sumber daya khususnya sumber daya manusia yang cukup memadai. Tetapi perusahaan belum memiliki Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan. Hal ini dapat menurunkan motivasi pegawai untuk mencapai kinerja yang bagus.

Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah manajemen pembangunan pengolahan dan distribusi air bersih kepada pelanggan. Berdasarkan data yang ada, banyak peralatan seperti mesin pompa yang digunakan hanya dapat beroperasi kurang dari 1 tahun sudah mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini berkaitan dengan beratnya medan antara lokasi sumber air dengan lokasi pelanggan, di mana sumber air umumnya berada agak di bawah, sedangkan pemukiman masyarakat yang menjadi pelanggan berada di pegunungan (distribusi dengan medan yang berat). Spesifikasi peralatan (pompa air) yang digunakan sudah sesuai, namun dari sisi kualitas peralatan yang masih perlu diperbaiki.

Selain permasalahan tersebut, cepatnya peralatan mengalami kerusakan juga disebabkan oleh tegangan (*voltage*) listrik PLN yang tidak stabil. Lokasi pompa air yang berada di pedesaan yang jauh dari gardu listrik, menyebabkan tegangan listrik naik turun. Hal tersebut menyebabkan peralatan elektronik cepat mengalami kerusakan.

Banyaknya penggunaan mesin pompa air pada sistem pendistribusian air minum pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, menyebabkan tingginya biaya operasional. Biaya operasional yang diperlukan adalah biaya rekening listrik dan biaya perawatan mesin pompa air. Biaya rekening listrik yang dibayarkan cukup besar. Selain karena banyak menggunakan mesin pompa air, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta sebagai entitas bisnis dikenakan *rate* bisnis (niaga). Sedangkan PERUMDA menjual air kepada pelanggan dominan mengenakan *rate* rumah tangga (non niaga). Penggunaan mesin pompa air yang cukup banyak pada medan yang berat dan kondisi tegangan (*voltage*) listrik yang tidak stabil (turun-

naik), menyebabkan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta membutuhkan biaya perawatan mesin pompa air yang cukup besar.

Pada satu sisi, pendapatan yang diterima PERUMDA dari penjualan air bersih kepada pelanggan sangat rendah, karena mayoritas pelanggannya adalah rumah tangga yang dikenakan tarif non niaga (tarif bersubsidi). Sementara pada sisi lain, biaya operasional perusahaan dari biaya listrik (tarif bisnis) dan biaya perawatan mesin pompa air sangat besar. Sehingga, PERUMDA sulit memperoleh keuntungan secara optimal. Jangankan melakukan investasi dari akumulasi keuntungan, untuk kenaikan gaji berkala dan bonus untuk pegawai saja sulit dilakukan. Sehingga, motivasi yang dimiliki pegawai PERUMDA cukup rendah.

BAB IV

ANALISIS INVESTASI PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA DANU ARTA KABUPATEN BANGLI

4.1 Kondisi Keuangan dan Operasional PDAM Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan investasi. Tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 membagi bentuk investasi pemerintah daerah menjadi dua: investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga bisa berupa pembelian saham atau pembelian surat hutang. Sedangkan investasi langsung berupa penyertaan modal pemerintah daerah atau pemberian pinjaman.

Salah satu alternatif investasi Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bangli adalah melakukan tambahan penyertaan modal ke PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Sampai dengan Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bangli telah melakukan investasi (penyertaan modal) pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta sebesar Rp18.251.049.750 yang terdiri dari investasi dalam bentuk uang dan barang. Selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Bangli, PERUMDA Air minum Tirta Danu Arta mendapatkan investasi dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 5.322.888.707 serta bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 21.505.030.980. Modal lainnya sebesar Rp. 31.080.414.

Pada bagian ini kami memaparkan kondisi objektif pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Analisis ini perlu diberikan untuk menyediakan perspektif bagi pemangku kepentingan tentang kondisi PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta dari aspek keuangan. Analisis akan membahas kondisi *real* di PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, analisis portofolio investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, dan beberapa poin rekomendasi.

TABEL 4.1
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
PERUMDA AIR MINUM TIRTA DANU ARTA KABUPATEN BANGLI

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
ASET	30.789.705.668,00	31.955.158.428,18	28.128.126.146,28	29.902.947.521,86	33.264.030.363,43
ASET LANCAR	6.463.735.350,00	5.396.835.997,00	3.466.900.544,03	3.763.933.636,51	7.298.674.369,34
Kas dan Bank	2.740.960.741,00	2.285.974.263,99	491.220.123,36	602.733.517,00	2.667.306.383,67
Kas	39.000.000,00	21.293.590,00	34.462.490,00	-	103.254.513,00
Bank	2.701.960.741,00	2.264.680.673,99	456.757.633,36	602.733.517,00	2.564.051.870,67
Investasi Jk. Pendek	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-
Surat Berharga	-	-	-	-	-
Piutang Usaha (Net)	3.149.010.317,00	2.457.578.627,15	2.260.339.533,20	2.271.325.147,40	3.686.785.782,75
Piutang Air	3.728.955.003,00	3.164.546.434,00	2.649.272.680,00	2.704.338.225,00	3.833.600.623,00
Piutang Non Air	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Usaha	(579.944.686,00)	(706.967.806,85)	(388.933.146,80)	(433.013.077,60)	(146.814.840,25)
Piutang non Usaha (Net)	12.682.800,00	116.738.687,00	-	-	-
Piutang non Usaha (Net)	12.682.800,00	116.738.687,00	111.738.687,00	97.075.187,00	83.075.187,00
Penyisihan Piutang Non Usaha	-	-	(111.738.687,00)	(97.075.187,00)	(83.075.187,00)
Persediaan	482.171.105,00	536.544.418,86	715.340.887,47	713.106.012,11	941.856.002,92
Persediaan Bahan Operasi Kimia	2.618.000,00	1.427.580,00	3.568.950,00	4.795.200,00	3.163.500,00
Persediaan Bahan operasi Lainnya	7.050.000,00	-	24.379.409,77	-	-
Persediaan Bahan Instalasi	447.471.817,00	516.758.092,09	711.999.018,70	709.731.578,34	915.156.174,92
Persediaan Lain-lain	25.031.288,00	18.358.746,77	-	23.185.724,77	23.536.328,00
Akumulasi Penurunan Nilai	-	-	(24.606.491,00)	(24.606.491,00)	-
Pembayaran Dimuka	78.910.387,00	-	-	176.768.960,00	2.726.200,00
Pembayaran Dimuka	78.910.387,00	-	-	176.768.960,00	2.726.200,00
Inestasi Jk. Panjang	-	-	-	-	-
Deposito Berjangka > 1 Tahun	-	-	-	-	-
Penyertaan	-	-	-	-	-
Investasi Jk. Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-
Nilai Perolehan	-	-	-	-	-
Akumulasi Penurunan Nilai	-	-	-	-	-
ASET TETAP	22.226.769.803,00	24.459.121.916,18	23.984.560.578,25	25.462.348.861,09	25.965.355.994,09
Nilai Perolehan	46.179.485.962,00	50.836.667.049,99	54.147.320.012,99	58.078.613.117,09	61.412.547.510,09
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	24.443.943,00	24.443.943,00	24.443.943,00	24.443.943,00	24.443.943,00
Instalasi Sumber Air	4.940.637.846,00	5.467.243.340,75	5.762.584.370,75	5.762.584.370,75	5.762.584.370,75
Instalasi Pompa	17.189.703.040,00	18.612.736.389,90	20.503.070.661,90	23.376.437.810,00	23.914.426.169,00
Instalasi Pengolahan Air	-	-	-	-	-
Instalasi Transmisi dan Distribusi bangunan / gedung	22.500.665.260,00	24.155.543.295,34	24.941.430.016,34	24.941.430.016,34	27.591.782.016,34
Peralatan dan Perlengkapan	409.607.062,00	409.607.062,00	421.335.582,00	421.335.582,00	421.335.582,00
Kendaraan / Alat Pengangkutan	322.756.111,00	986.085.859,00	1.172.219.879,00	2.185.655.163,00	2.185.655.163,00
Inventaris / Perabot Kantor	791.672.700,00	1.181.007.160,00	1.322.235.560,00	1.366.726.232,00	1.512.320.266,00
Akumulasi Penyusutan	(23.952.716.159,00)	(26.377.545.133,81)	(30.162.759.434,74)	(32.616.264.256,00)	(35.447.191.516,00)
ASET TETAP LEASING	-	-	-	-	-
Nilai perolehan	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA	2.099.200.515,00	2.099.200.515,00	676.665.024,00	676.665.024,26	-
Aset Tetap dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-
Uang Jaminan	-	-	-	-	-
Pembayaran Dimuka Pembagian Laba	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	(2.099.200.448,00)
Aset Rusak Berat	-	-	-	-	-
Aset Lain-lainnya	2.099.200.515,00	2.099.200.515,00	676.665.024,00	676.665.024,26	2.099.200.448,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30.789.705.668,00	31.955.158.428,18	28.128.126.146,28	29.902.947.521,57	33.264.030.363,70
KEWAJIBAN	2.875.752.261,00	4.830.210.418,00	2.946.081.925,00	4.585.452.901,00	4.577.509.510,39
KEWAJIBAN JK. PENDEK	1.629.166.470,00	2.068.528.940,00	2.409.094.056,00	3.137.055.632,00	3.458.759.546,39
Hutang Lancar	484.676.538,00	1.070.467.724,00	1.710.518.803,00	3.137.055.632,00	3.418.617.147,39
Hutang Usaha	24.522.575,00	910.784.638,00	1.005.439.291,00	3.030.385.281,00	2.741.467.878,50
Hutang Non Usaha	-	142.775.982,00	704.519.915,00	106.373.634,00	55.451.340,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	136.368.960,00	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-
Hutang Pajak	323.785.003,00	16.907.104,00	559.597,00	296.717,00	621.697.928,89
Pinjaman Jk. Pendek	-	-	17.453.773,00	-	-
Pinjaman Bank Jk. Pendek	-	-	-	-	-
Pinjaman Jk. Pendek Lainnya	-	-	17.453.773,00	-	-
Kewajiban Jk. Panjang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Kewajiban Lain	1.144.489.932,00	998.061.216,00	681.121.480,00	-	40.142.399,00
Iuran Pensiun	-	746.519.463,00	-	-	-
Kewajiban Jk. Pendek Lainnya	1.144.489.932,00	251.541.753,00	681.121.480,00	-	40.142.399,00
KEWAJIBAN JK. PANJANG	1.246.585.791,00	2.761.681.478,00	536.987.869,00	1.448.397.269,00	1.118.749.964,00
Pinjaman Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	-
Hutang Leasing	-	-	-	867.373.489,00	537.726.184,00
Hutang Jk. Panjang Lainnya	1.246.585.791,00	2.761.681.478,00	536.987.869,00	581.023.780,00	581.023.780,00
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	-	-	-	-	-
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-
Uang Jaminan Langganan	-	-	-	-	-
Cadangan Dana	-	-	-	-	-
EKUITAS	27.913.953.407,00	27.124.948.010,18	25.182.044.221,28	25.317.494.620,57	28.686.520.853,31
KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	23.574.938.457,00
Pemerintah Pusat	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00	5.323.888.707,00
Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
Pemerintah Kab./Kota	-	-	-	18.251.049.750,00	18.251.049.750,00
BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	39.756.080.730,00	39.756.080.730,00	39.756.080.730,00	21.505.030.980,00	21.505.030.980,00
Pemerintah Pusat	21.505.030.980,00	21.505.030.980,00	21.505.030.980,00	21.505.030.980,00	21.505.030.980,00
Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
Pemerintah Kab./Kota	18.251.049.750,00	18.251.049.750,00	18.251.049.750,00	-	-
MODAL LAINNYA	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00
Modal Hibah	-	-	-	-	-
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
Modal Lainnya	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00	31.080.414,00
CADANGAN	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	-	-
Cadangan Tujuan	-	-	-	-	-
LABA DITAHAN (SALDO AKHIR TAHUN LALU)	(18.791.248.921,00)	(19.587.963.259,01)	(20.478.644.236,82)	(19.870.270.575,72)	(19.793.555.230,30)
LABA / (RUGI) PERIODE BERJALAN	1.594.152.477,00	1.601.861.418,19	549.638.607,10	76.715.345,29	3.369.026.232,61

TABEL 4.2
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
PERUMDA AIR MINUM TIRTA DANU ARTA KABUPATEN BANGLI

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PENDAPATAN	25.469.358.375,00	28.264.918.363,66	28.144.885.880,48	27.694.945.829,00	43.292.926.832,29
PENDAPATAN OPERASIONAL	25.426.317.823,00	27.957.379.426,00	28.104.041.235,00	27.555.482.611,00	43.230.456.190,00
Pendapatan Penjualan Air	22.487.638.231,00	24.166.160.066,00	25.293.940.162,00	25.383.472.111,00	38.739.446.790,00
Harga Air	20.304.888.231,00	21.843.877.066,00	22.833.680.162,00	22.843.202.111,00	35.786.420.790,00
Beban Tetap Pelanggan	2.182.750.000,00	2.322.283.000,00	2.460.260.000,00	2.540.270.000,00	2.953.026.000,00
Pendapatan Air Lainnya					
Pendapatan Non-Air	2.938.679.592,00	3.791.219.360,00	2.810.101.073,00	2.172.010.500,00	4.491.009.400,00
Pendapatan Sambungan Baru	2.792.149.670,00	3.098.542.400,00	1.815.280.273,00	1.169.146.600,00	3.504.685.000,00
Pendapatan Denda	37.235.000,00	76.395.000,00	225.460.000,00	268.171.900,00	286.744.400,00
Pendapatan Pengujian Laboratorium					
Pendapatan Penyambungan Kembali			722.615.000,00	654.215.000,00	654.605.000,00
Pendapatan Penggantian Meter Air					
Pendapatan AMDK					
Pendapatan Non Air Lainnya	109.294.922,00	616.281.960,00	46.745.800,00	80.477.000,00	44.975.000,00
Pendapatan Kemitraan					
Pendapatan Air Limbah					
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	43.040.552,00	307.538.937,66	40.844.645,48	139.463.218,00	62.470.642,29
BEBAN	23.035.670.898,00	26.097.745.385,47	27.149.742.112,38	27.201.435.726,71	38.732.981.830,79
BEBAN OPERASIONAL	23.026.864.695,00	26.085.245.335,36	27.144.005.948,27	27.199.178.334,71	38.726.215.609,68
Beban Pegawai	6.787.678.766,00	6.183.570.339,00	8.108.799.276,00	8.939.751.456,00	11.481.796.953,00
Beban Listrik	7.159.659.886,00	8.121.448.516,00	8.714.243.091,00	8.876.016.706,00	9.846.165.145,00
Beban BBM	1.353.600,00				
Beban Pemakaian Bahan Kimia					
Beban Pembelian Air Curah					
Beban Pemeliharaan	2.019.034.759,00	4.310.906.009,81	4.143.829.014,29	4.329.634.842,36	9.395.020.827,92
Beban Pemakaian Bahan Pembantu		1.731.263.967,10	146.541.411,90		
Beban Kantor	99.466.894,00	256.336.083,23	451.929.087,00	361.185.538,00	610.274.366,77
Beban Pinjaman					
Beban Penyisihan Piutang	88.235.767,00	127.023.120,85	123.796.677,95	44.079.930,80	62.614.649,65
Beban Penyusutan	2.082.385.527,00	2.424.828.975,81	2.362.678.876,93	2.250.603.701,03	3.507.592.284,34
Kerugian Penurunan Nilai					
Beban Usaha Lainnya	4.789.049.496,00	2.929.828.593,56	3.092.188.513,20	2.397.906.160,52	3.822.751.383,00
BEBAN NON OPERASIONAL	8.806.203,00	12.500.050,11	5.736.164,11	2.257.392,00	6.766.221,11
LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.433.687.477,00	2.167.172.978,19	995.143.768,10	493.510.102,29	4.559.945.001,50
PAJAK PENGHASILAN	839.535.000,00	565.311.560,00	445.505.161,00	416.794.757,00	1.190.918.768,89
LABA RUGI BERSIH	1.594.152.477,00	1.601.861.418,19	549.638.607,10	76.715.345,29	3.369.026.232,61

Pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 disajikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/(Rugi) komparatif PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta selama lima tahun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023. Dalam perioda tersebut, aset, utang jangka panjang, dan ekuitas PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta berfluktuasi dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Kenaikan aset lancar didominasi oleh kenaikan piutang usaha. Namun kenaikan piutang juga diiringi dengan kenaikan penyisihan piutang usaha. PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta juga menunjukkan kenaikan pada aset tetap produktif. Sebagai catatan, metode depresiasi (p e n y u s u t a n) yang

digunakan oleh PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta adalah metoda depresiasi yang dipercepat dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metode ini menyebabkan biaya depresiasi di masa-masa awal perolehan akan lebih besar dibandingkan dengan masa setelahnya. Pilihan ini menyebabkan kenaikan biaya depresiasi yang cukup tinggi setiap kali aset tetap bertambah.

Aset tetap PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Utang jangka pendek PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan bahkan melebihi 100% dari nilai Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Sedangkan, Utang jangka panjang terjadi sebaliknya. Utang jangka panjang menunjukkan fluktuasi nilai selama lima tahun dengan kecenderungan menurun. Dengan demikian, maka total utang juga mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat.

Pada sisi ekuitas, fluktuasi ekuitas juga terjadi dalam lima tahun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Fluktuasi ekuitas tersebut murni disebabkan oleh fluktuasi laba PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Fluktuasi laba perusahaan juga menyebabkan fluktuasi Saldo Laba Ditahan.

Pada Tabel 3.2 disajikan informasi pendapatan dan biaya PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Berdasarkan tiga pendapatan penjualan air, pendapatan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli dari harga air dan Beban Tetap pelanggan. Sementara itu, pendapatan lain-lain didominasi oleh pendapatan dari sambungan baru dan pendapatan non air lainnya.

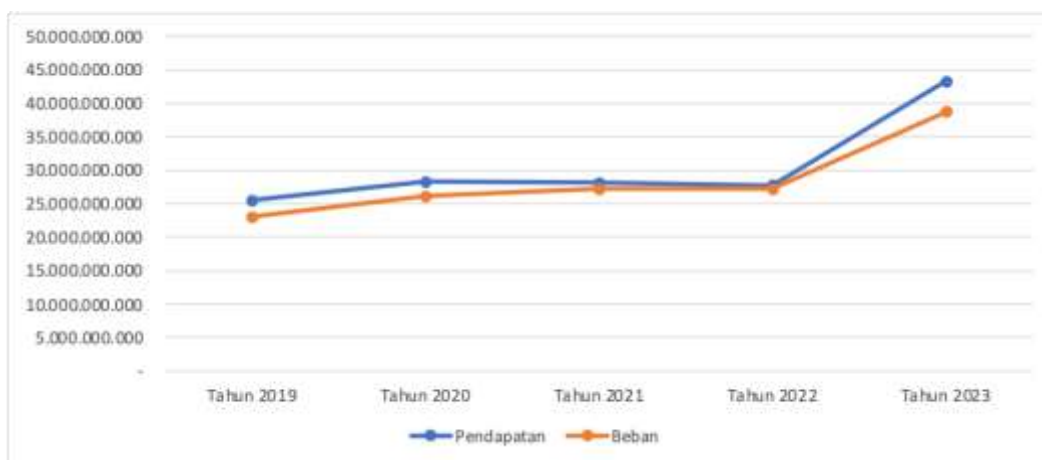
Biaya usaha yang ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli cukup besar. Pada Tahun 2019, biaya usaha adalah Rp23 miliar. Namun, pada Tahun 2023 meningkat pesat menjadi Rp38,7 miliar, atau naik 68%. Sedangkan pendapatan naik 70% selama periode yang sama. Pada Tahun 2022, jumlah pendapatan usaha dan biaya usaha memiliki selisih yang paling kecil

sehingga selama rentang waktu 2019-2023, laba pada tahun 2022 merupakan laba yang terkecil. Kemungkinan hal ini merupakan akumulasi dampak dari Pandemi Covid-19.

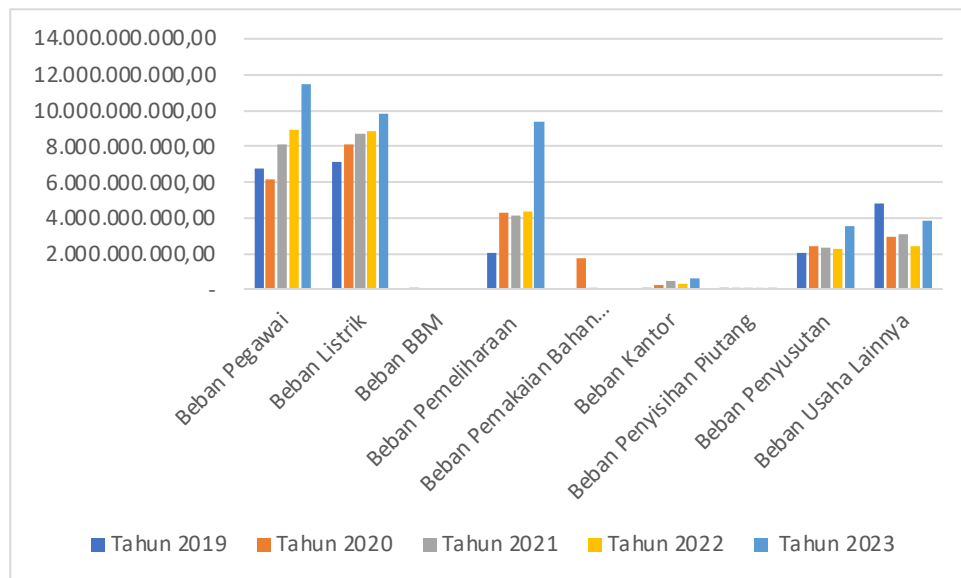
Pada Gambar 2 disajikan pertumbuhan biaya-biaya di PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Biaya yang tertinggi adalah pada biaya pegawai, disusul oleh biaya listrik dan biaya pemeliharaan. Biaya yang mengalami peningkatan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023 antara lain biaya pegawai selama 4 tahun terakhir, dan biaya listrik selama 5 tahun berturut-turut, sedangkan biaya lainnya mengalami fluktuasi.

Biaya yang mengalami peningkatan cukup tajam yakni biaya pemeliharaan pada tahun 2020 sebesar 114%, biaya kantor pada tahun 2020 sebesar 158%, biaya kantor pada tahun 2021 sebesar 76%, biaya pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar 117%, dan biaya kantor pada tahun 2023 sebesar 69%.

Gambar 4.1 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Biaya 2019-2023



Gambar 4.2 Perkembangan Biaya Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli 2019-2024



Tabel 4.3
Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli

Kinerja keuangan	2019	2020	2021	2022	2023
ROA	5,18%	5,01%	1,95%	0,26%	10,13%
ROE	5,71%	5,91%	2,18%	0,30%	11,74%
Rasio hutang dengan total aset	9,34%	15,12%	10,47%	15,33%	13,76%

Pada Tabel 4.3 disajikan kinerja keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Kinerja keuangan yang diukur adalah ROA, ROE dan Rasio hutang dengan total aset.

Analisis Investasi

Analisis Risiko Investasi

Risiko sebuah perusahaan berhubungan erat dengan *return* (pengembalian) yang diterima. Secara teoretis, setiap *return* yang lebih besar berhubungan dengan risiko juga lebih besar. Perusahaan tidak bisa menghindari risiko, namun harus

melakukan mitigasi atau pengurangan dari dampak risiko yang mungkin dihadapi. Berikut diberikan analisis atas risiko investasi pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta berdasarkan beberapa indikator risiko utama.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasional rutin. PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta memiliki risiko operasional yang cukup signifikan yang perlu dikendalikan.

Pelanggan terbesar adalah rumah tangga (tarif non bisnis). Total piutang per 31 Desember 2023 adalah Rp3,686 miliar atau setara dengan 96,16% dari total piutang air. Perbandingan antara piutang air dengan pendapatan air menunjukkan bahwa 9,89% dari pendapatan air adalah berupa piutang. Besaran nilai ini mengisyaratkan bahwa risiko operasional perusahaan hanya sebagian kecil berasal dari kegagalan penagihan piutang.

Risiko operasional kedua adalah sumber bahan baku air. Wilayah cakupan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta cukup luas dengan lokasi berbukit-bukit, sumber air berlokasi lebih rendah dari lokasi konsumen. Untuk bisa mencakup semua wilayah tersebut, tentu perusahaan perlu menjamin sumber bahan baku air untuk diolah. Sumber bahan baku air yang bisa digunakan perusahaan air minum biasanya berasal dari mata air atau sungai. Risiko yang mungkin terjadi misalnya berhubungan dengan hak penguasaan mata air dan diperlukannya mesin pompa air untuk mendorong air menuju lokasi konsumen. Salah satu akibat dari kelemahan pengelolaan risiko ini adalah rusaknya pompa air dan bocornya air dari kerusakan pipa karena menahan beban berat.

Risiko ketiga yang dihadapi oleh perusahaan adalah potensi kehilangan air dalam proses distribusi. Pada Tahun 2023, PERUMDA Air Tirta Danu Arta melaporkan bahwa perusahaan kehilangan air dalam distribusi hingga 34,72% akibat keusangan peralatan (jaringan distribusi seperti pipa dan sambungannya sudah berusia tua). Kondisi kehilangan air masih kurang dari 40%. Kehilangan air dalam proses distribusi merugikan perusahaan karena air yang terbuang

tidak bisa menjadi pendapatan. Risiko ini, yang lazim juga disebut *Non-Revenue Water* masih sangat tinggi untuk kondisi Kabupaten Bangli bila dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan sebesar 20%. Risiko terkait lainnya adalah penggantian meter air (*water meter*), pembacaan *water meter* yang lebih akurat, dan tera ulang untuk *water meter* lama.

Risiko Strategis

PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta memiliki posisi strategis dalam pemenuhan kebutuhan primer (air bersih) untuk masyarakat Kabupaten Bangli. Sebagai sebuah perusahaan milik pemerintah daerah, PERUMDA Tirta Danu Arta memiliki keunggulan dalam beberapa hal. Seperti, sebagai sebuah badan usaha milik daerah (BUMD), PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta memiliki dukungan pendanaan dari pemerintah daerah (walau tidak maksimal, sesuai kemampuan pemerintah daerah). Selain dukungan dana, status sebagai BUMD akan memberi keunggulan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku air, pencarian pelanggan, penagihan piutang, dan lain-lain.

Namun, posisi yang menguntungkan tersebut juga memiliki konsekuensi. Perusahaan harus bisa mengelola risiko strategis yang melekat pada diri perusahaan dan yang ada di lingkungan luar yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Secara internal, perusahaan memiliki isu pertumbuhan jangka panjang yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada Tahun 2023 perusahaan melaporkan laba bersih sebesar Rp. 3,369 Miliar, namun perusahaan masih membukukan laba ditahan sebesar Rp. -19,793 Miliar. Artinya perusahaan masih menanggung rugi sebesar Rp. 19,793 Miliar.

4.2 Analisis Penambahan Investasi

Pada bagian sebelumnya telah dibahas risiko investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Dari sisi risiko operasional, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta memiliki setidaknya tiga risiko yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Terakhir, dari sisi strategis, PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta harus bisa

mengelola risiko ini. Laba ditahan yang masih negatif harus bisa dianalisis penyebabnya dan ditemukan solusinya. Misalnya, perusahaan perlu menganalisis kesesuaian antara praktik akuntansi atas depresiasi aset dengan kondisi operasional dan pengaruhnya kepada persepsi publik dalam jangka panjang.

Secara strategis, tambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta tetap perlu dipertimbangkan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. *Pertama*, kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta cukup baik. Kinerja profitabilitas perusahaan memang menunjukkan nilai yang belum memuaskan. Rasio-rasio lain misalnya yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan rasio likuiditas masih belum baik. Perusahaan perlu memperhatikan kemungkinan rendahnya profitabilitas perusahaan adalah disebabkan oleh besarnya biaya tidak-keluar-kantong seperti depresiasi aset tetap. Biaya sejenis ini bisa memberikan efek psikologis kepada pembuat keputusan sementara pengaruhnya pada kas perusahaan tidak ada. Selain itu, perusahaan tentu juga perlu mengefisienkan biaya-biaya lain.

Alasan *Kedua* adalah kebutuhan masyarakat atas layanan air bersih. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta secara langsung menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sebagai salah satu dari kebutuhan primer manusia, maka ketersediaan air bersih bagi masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan data dari PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Tahun 2023, ada 13 desa di Kecamatan Kintamani bagian atas yang belum memperoleh layanan air bersih dari PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Untuk dapat melayani masyarakat di 13 desa tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan proposal rencana bisnis yang diajukan PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta pada Tahun 2023, biaya investasi yang dibutuhkan sekitar Rp. 225 Milyar. Biaya tersebut dipergunakan untuk membangun bendungan (sumber air), membangun reservoir, jaringan dari bendungan ke reservoir, mesin-mesin pompa, dan jaringan distribusi dari reservoir ke pelanggan. Selain untuk membangun SPAM baru,

investasi juga diperlukan untuk mengganti mesin-mesin pompa dan jaringan distribusi yang sudah rusak.

4.3 Analisis Penyelesaian Asset Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Tahun 2023 diuraikan bahwa terdapat bantuan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Selain itu, terdapat asset bantuan pemerintah yang belum dimasukan pada Laporan Keuangan. Pada Neraca Tahun 2023, terdapat bantuan Pemerintah Pusat senilai Rp. 21.505.030.980,00 yang belum ditetapkan statusnya. Sementara pada daftar asset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli, terdapat asset-asset senilai Rp. 40.287.813.572,00 yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Asset-asset tersebut selama ini sudah dimanfaatkan dalam operasional PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta.

Sesuai dengan uraian di atas, terdapat perbedaan antara data yang ada pada Laporan Keuangan (Neraca) PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta dan data pada Daftar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli. Pada Neraca PERUMDA tercantum asset (bantuan Pemerintah) yang belum ditetapkan statusnya dengan nilai Rp. 21.505.030.980,00. Sementara pada daftar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli tercantum nilai asset sebesar Rp. 40.287.813.572,00. Setelah ditelusuri pada administrasi PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, ada beberapa asset bantuan pemerintah yang belum dimasukkan dalam Laporan Keuangan (Neraca) (*Off Balance Sheet*) dan ada beberapa asset bantuan pemerintah yang sudah dimasukkan dalam Laporan Keuangan (Neraca)(*On Balance Sheet*). Berdasarkan penelusuran pada Laporan Keuangan PERUMDA, Catatan Asset Perumda, dan daftar asset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah Bangli kepada PERUMDA, terdapat asset senilai Rp. 8.765503.835,00 yang tidak terdaftar pada tabel asset

yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal. Hal tersebut terjadi dikarenakan asset-asset tersebut belum dilakukan serah terima dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangli. Sehingga, asset-asset yang belum dilakukan serah terima barang milik negara (BMN) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, belum bisa dijadikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Dan berdasarkan hasil *Focus Groups Discussion* (FGD) Terbatas pada Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Bangli, yang dihadiri oleh para pihak terkait dari PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, disepakati bahwa asset yang akan diserahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Bangli kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta adalah asset yang terdaftar pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli yang terdiri dari 26 item dengan nilai perolehan sebesar Rp. 40.287.813.572,00.

Mekanisme dan tata cara Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Wali Kota. Penyertaan modal dapat berupa pendirian BUMN/BUMD baru atau penambahan modal untuk peningkatan kapasitas usaha BUMN/BUMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, mekanisme pemindahtanganan asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli sebagai penyertaan modal kepada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta, harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan Peraturan Bupati Bangli, yang mengatur tentang pemindahtanganan asset sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik berbentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) maupun berbentuk Perseroan Daerah (PERSERODA). Nilai asset milik Pemerintah Daerah yang akan dipindahtangankan sebagai penyertaan modal kepada BUMD adalah nilai wajar pada saat dipindahtangankan. Nilai wajar adalah estimasi harga suatu

barang atau jasa atau asset yang dimaksudkan untuk secara akurat mewakili nilai estimasinya. Untuk asset non property (tanah) seperti kendaraan, mesin, peralatan, penentuan nilai wajar ditentukan berdasarkan umur ekonomi, nilai perolehan, dan nilai residu (sisa).

BAB V

PENUTUP

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan analisis terhadap analisis risiko dan analisis penambahan modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta. Analisis risiko dibagi menjadi risiko operasional dan strategis. Dari risiko operasi PERUMDA Air Minum Tirta Danu Tirta, terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian dan dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko tersebut meliputi risiko terkait risiko sumber bahan baku air dan risiko kehilangan air (Non-Revenue Water) yang masih jauh dari kondisi ideal.

Analisis penambahan modal, diperlukan penambahan modal baru pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta untuk meningkatkan kemampuan operasional dan membangun sarana pengolahan air dan distribusi kepada konsumen terutama di Kecamatan Kintamani bagian atas. Penambahan penyertaan investasi diperlukan mengingat lokasi sumber air dan lokasi konsumen menghadapi medan yang berat serta terbatasnya sumber air yang ada. Sesuai Rencana Bisnis PERUMDA, besar investasi penyertaan modal yang diperlukan sebesar Rp. 225 Milyar.

Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS), perlu diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Asset yang diserahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli kepada PERUMDA terdiri dari 26 item dengan nilai perolehan Rp. 40.287.813.572,00. Nilai asset yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ke PERUMDA adalah nilai wajar dari asset pada saat dipindahtangankan.

SARAN-SARAN

1. PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta merupakan perusahaan umum yang melaksanakan tugas menyediakan air bersih untuk masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Bangli. Walaupun berstatus sebagai perusahaan umum yang melaksanakan tugas Pemerintah Daerah, PERUMDA perlu meningkatkan Corporate Governance agar dapat meningkatkan aspek ekonomi dan sosial, baik untuk perusahaan, pegawai, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Bangli.
2. Wilayah kerja PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta berada pada medan yang cukup berat, di mana sumber air baku (air permukaan/mata air) umumnya secara geografis berada di bawah untuk melayani pelanggan yang lokasinya berada di atas. Untuk itu diperlukan investasi dan biaya operasional yang lebih besar untuk mendistribusikan air dari bawah (sumber air baku) ke atas (pelanggan). Pada satu sisi, PERUMDA (sebagai entitas usaha) membayar listrik dikenakan tarif bisnis. Sementara pada sisi lain, PERUMDA (sebagai perusahaan penugasan) harus menjual air dengan tarif subsidi.

Selain itu, PERUMDA masih menghadapi masalah dengan adanya program PAMSIMAS/PAMDES di wilayah kerja PERUMDA, yang anggarannya juga bersumber dari pemerintah. Keberadaan PAMSIMAS/PAMDES ini menyebabkan berkurangnya pelanggan dan menurunnya pendapatan PERUMDA. Sehingga kinerja perusahaan tidak mencapai target, apalagi menyeter dividen sebagai pendapatan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih, fokus pada PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://banglikab.bps.go.id/id>. Distribusi Pendapatan Rasio Gini Kabupaten Bangli Tahun 2019 – 2023.
- <http://pdambangli.co.id/sejarah>. Sejarah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>. Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111795/permendagri-no-52-tahun-2012>. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64765/pp-no-54-tahun-2017>. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Husnan, S. & Suwarsono. 1999. Studi Kelayakan Proyek, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kasmir dan Jakfar. 2012. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Nanga, M. (2001). *Ekonomi Makro: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Salilama, A., Ahmad, D., & Madjowa, N.F. Analisis Kebutuhan Air Bersih (PDAM) di Wilayah Kota Gorontalo. RADIAL – jurnal peradaban sains, rekayasa dan teknologi Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo VOLUME 6 NO. 2.
- Siagian, S.P. 2019. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, A. 2007. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tim BPKP. 2020. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bangli Tahun Buku 2019, Nomor LEV-261/PW22/4/2020. Denpasar: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.
- Tim BPKP. 2021. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Buku 2020, Nomor: LEV-303/PW22/4/2021. Denpasar: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.
- Tim BPKP. 2022. Laporan Evaluasi Kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli Tahun Buku 2021, Nomor: LEV-383/PW22/4/2022. Denpasar: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.

- Tim BPKP. 2023. Linerja PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli Tahun Buku 2022, Nomor PE.09.03/LHP-414/PW22/4/2023. Denpasar: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.
- Tim BPKP. 2024. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PERUMDA Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli Tahun Buku 2023, Nomor: PE.09.03/LHP-365/PW22/04/2024. Denpasar: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali.
- Utari, D., Purwanti, A. & Prawironegoro, D. 2014. Manajemen Keuangan: Kajian Praktik dan Teori Dalam Mengelola Keuangan Organisasi Perusahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yekti, M.I., Arsana, I.G.N.K. & Aryasavira, M.D.B. 2020. Analisis Perubahan Penggunaan Air Bersih Sebelum dan Sesudah Terjadi Kenaikan Tarif PDAM di Kabupaten Bangli. Jurnal Teknik Pengairan 11(1):22-30.